



**RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025



**RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan rencana program;
 - b. kegiatan;
 - c. sub kegiatan dan indikator kinerja;
 - d. pendanaan indikatif;
 - e. lokasi kegiatan; dan
 - f. kelompok sasaran.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL

Suberti Kuntaningsih

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 26.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Tahun 2026 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional

dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2025 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

15. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026. disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah penyusunan renja telah mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah serta evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp34.822.839.501,00,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp1.546.303.401,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.999.192.932,00, dan Belanja Hibah Rp30.192.343.168,00 meliputi 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan.

Tingkat capaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 98,77% dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp34.394.508.903,00,00

2.1.1. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Semua Program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (96,46%)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (98,98%)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (96,67%).
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (98,59%)

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (66,35%)
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (99,91%)
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,22%)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98,64%)
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (98,93%)
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (78,98%)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (99,82%)
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (96,98%)
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (93,66%)
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (90 %)
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (21,85 %)
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (64,88%)
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (38,07%)
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,75%)
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (99,62 %)
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (97,67%)
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,95 %)
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (94,41%)
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (100%)
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (89,09 %)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (99,92%)
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (69,98%)
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (92,40%)
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (99,80%)
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (57,97%)
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (92,33%)
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (100%)
- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (74,33%)

2.1.3. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang melebihi target.

2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2024

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :
 - a. Adanya kebijakan pemerintah, baik propinsi, kabupaten, maupun pusat, sehingga program/kegiatan yang sudah direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :
 - a. Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.

- b. Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang direncanakan

2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
2. Peran dan Fungsi para pemangku kepentingan, lembaga non struktural (FKUB, BNK, FKDM, FPK, PPWK) yang perlu ditingkatkan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini diatasi dengan mengoptimalkan THL yang telah ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penguatan koordinasi, kerjasama dan *networking*/jejaring dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dapat terlihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10	11-(10/4)
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 ^a	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	13 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%
8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
8.01.01.2.02.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	8 layanan	8 layanan	8 layanan	100%	8 layanan	8 layanan	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10	11-(10/4)
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	13 Paket	100%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	100%	350 Dokumen	350 Dokumen	100%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	65%	20 Laporan	20 Laporan	100%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin terlaksana	16 layanan	16 layanan	16 layanan	16 layanan	100%	16 layanan	16 layanan	100%
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	100%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10	11-(10/4)
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	46 unit	46 unit	46 unit	100%	46 unit	46 unit	100%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	100%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10	11-(10/4)
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	100 persen	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	95 persen	95 persen	100%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	1 kali	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 kali	-	48 kali	48 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan: pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	5	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	80 Orang	100%
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	82,5%	82,5%	82,5%	100%	82,5%	82,5%	100%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	76%	70%	72%	100%	100%	74%	74%	100%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	8 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftar Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftar Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 orang	150 Orang	150 orang	100%	150 Orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	100%	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9 kali	-	35 kali	35 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	11=(10/4)
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93%	90%	91%	100%	100%	92%	90%	100%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitas Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	100%
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10	11-(10/4)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 8.01.06.2.01.06	2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 6 Dokumen	5 6 Dokumen	6 6 Dokumen	7 6 Dokumen	8-(7/6) 100%	9 6 Dokumen	10 6 Dokumen	11-(10/4) 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

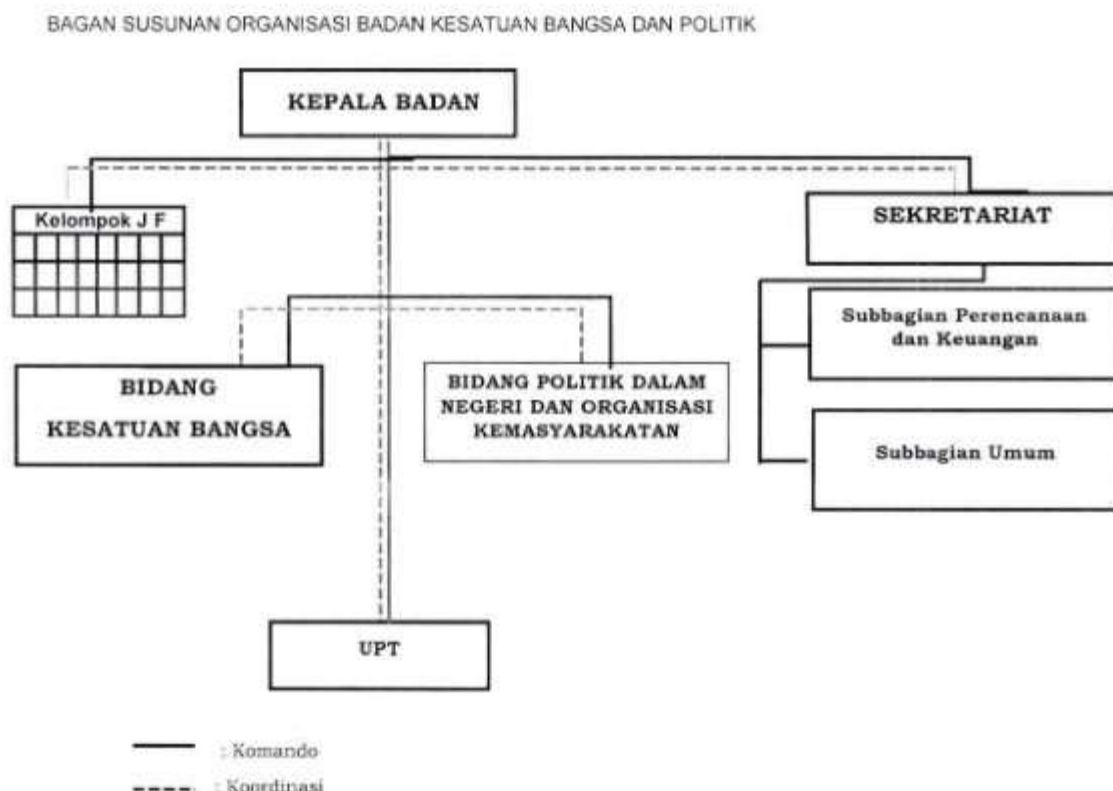
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	SASARAN IKU											
1.	Persentase konflik Sosial yang tertangani	Persen	90	91	92	93	100	100	92	93		
2.	Nilai AKIP PD	skor	80,1	80,15	80,20	80,25	82,55*	82,78*	80,20	80,25		
B.	SASARAN NON IKU											
1.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	persen	85	90	95	100	85	90	95	100		
2.	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	persen	80	82,5	82,5	82,5	80	100	82,5	82,5		
3.	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	70	72	74	76	70	100	74	76		
4.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	persen	85	90	95	100	85	90	95	100		
5.	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	persen	90	91	92	93	100	100	92	93		

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	persen	72	74	76	78	72	100	76	78	
7.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
C.	SPM										
	-										
D.	IKK										
	-										

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni persentase konflik sosial yang tertangani tergolong cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: Persentase konflik sosial yang tertangani (100%)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya :

1. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan);
2. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat;

3. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai efek dari semakin ramainya kunjungan wisata dan mobilitas penduduk tinggi;
4. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan meresahkan masyarakat.
5. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

2.3.3 Dampak

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah
2. Kenyamanan dan ketertiban terganggu serta meresahkan masyarakat, generasi muda menjadi generasi yang tidak berkualitas baik secara mental maupun fisik.
3. Menjamurnya ormas-ormas yang tidak memiliki ijin, tidak ada kejelasan tentang legalitasnya serta tidak sesuai aturan yang berlaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
4. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila berdampak pada fenomena menurunnya rasa nasionalisme, kecenderungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, serta kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen;
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat wisata/hiburan yang cukup signifikan;
3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat;
4. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme, westernisasi dan pasar terbuka;
5. Pengaruh ideologi trans-nasional, isu HAM;
6. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat;
7. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul dalam Pemilu rata-rata 80%;
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan jawa yang adiluhung;
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, akan melaksanakan prioritas tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik;
- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
- 6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik masyarakat;
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Prioritas tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesatuan bangsa, yaitu:

- 1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- 2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik, hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya peningkatan kesadaran politik masyarakat;
- 3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- 5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
- 7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat rasionalisasi pagu anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar Rp7.127.877.325,24 yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan antara lain:

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, adalah sebagai berikut :

- I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan
 - a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 1. Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp450.000.000,00
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp36.150.000,00.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat anggaran Rp32.939.900,00 .
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD anggaran sebesar Rp1.879.800,00.
 4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terdapat anggaran Rp1.919.800,00.
 5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terdapat anggaran Rp1.759.900,00.
 6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp32.785.000,00.
 7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp899.000,00.
 8. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp7.206.000,00.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp1.710.417.785,24.
 2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran terdapat anggaran sebesar Rp2.464.900,00.
 3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD anggaran Rp37.947.000,00.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdapat anggaran sebesar Rp32.454.100,00
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdapat anggaran Rp9.119.000,00.
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat pengurangan anggaran Rp73.744.000,00
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat anggaran sebesar Rp5.000.000,00.
 - 4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat anggaran sebesar Rp5.799.900,00.
 - 5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat anggaran sebesar Rp1.200.000,00.
 - 6. Subkegiatan Fasilitas kunjungan Tamu terdapat anggaran sebesar Rp23.104.000,00.
 - 7. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat anggaran sebesar Rp233.104.000,00.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp37.845.000,00
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat penambahan anggaran sebesar Rp63.935.800,00.
 - 2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat anggaran sebesar Rp63.917.000,00.
 - 3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat anggaran sebesar Rp5.600.000,00.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat anggaran Rp68.000.000,00.
 - 2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran Rp14.350.000,00.
 - 3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp26.580.000,00
 - 4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp6.000.000,00

- III. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terdapat anggaran Rp141.471.000,00.
 2. Subkegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sebesar Rp1.115.000,00.
- IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat anggaran Rp274.913.100,00.
 2. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah anggaran Rp1.496.578.740,00.
- V. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah anggaran Rp270.425.700,00 .
- VI. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah anggaran Rp270.425.700,00.

VII. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Subkegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah anggaran Rp2.245.000,00.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat anggaran Rp43.510.000,00 .
3. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah anggaran Rp209.050.000,00
4. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat anggaran Rp39.589.900,00
5. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat anggaran Rp201.614.800,00.

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2026 dapat kita lihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	76 %	500.000.000				78 Persen	450.000.000,00	
	Adat, Semi, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	3 Kali				Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	1 Kali	450.000.000,00	
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	500.000.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	450.000.000,00	
	SEMUA URUSAN					SEMUA URUSAN					
	PROGRAM:					PROGRAM:					
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	2.217.929.152	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	2.206.095.024,60	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	28 Dokumen	94.601.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	16.291.000	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.991.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.101.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	30.527.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	880.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	790.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	920.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	430.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	760.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	29.093.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.430.000	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	410.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	900.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terakumulasi	4 layanan	1.660.705.765	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terakumulasi	4 layanan	1.603.462.224,60	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	1.624.885.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	1.593.842.224,60	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.325.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	34.495.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	7.620.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 dokumen	332.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	332.200	
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	332.200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	332.200	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	9 layanan	222.115.787	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	176.542.600	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.215.660	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.216.100	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.085.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	28.085.500	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.882.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.081.027	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.800.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	350 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	350 Dokumen	1.200.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	176.651.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	132.241.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol			69.540.000		Badan Kesbangpol			56.310.000	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	69.540.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	56.310.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	6 layanan	80.464.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	6 layanan	65.567.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.385.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.650.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	42.204.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53.917.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.875.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	90.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 Layanan	107.590.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	154 Unit	62.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	62.600.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	12.710.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.410.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	8.860.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	26.580.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	85%	1.311.465.234	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90%	126.315.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	23 Kali	1.311.465.234	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 Kali	126.315.000	
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	390 Orang	154.845.000	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	126.315.000	

No.	Kerangka Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b	Pembinaan terhadap aktivitas kepasakbrakan dan Purnapaskabraka	Kab. Gunungkidul	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	3 Dokumen	1.156.620.234	Pelaksanaan Kebijaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	0
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	1.521.885.340	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	207.634.400
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	33 Layanan	1.521.885.340	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	32 Layanan	207.634.400

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	662 Orang	100.074.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	106.149.600	
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	1.421.810.740	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	101.485.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	74%	74.290.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	76%	52.660.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	7 Kali	74.290.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	8 Kali	52.660.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	74.290.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	52.660.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	95%	318.703.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	100%	146.253.800	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3 Kali	318.703.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	146.253.800	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	318.703.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450 Orang	146.253.800	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	92%	408.144.800	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93 %	272.758.800	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitas Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	53 Layanan	408.144.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitas Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	53 Layanan	272.758.800	
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1.254.100	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2.245.100	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210 Orang	48.385.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	28.360.000	
c	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	970 Orang	183.460.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	134.944.000	
d	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	32.154.900	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	39.589.900	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1) c	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	(3) Kab. Gunungkidul	(4) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	(5) 6 Dokumen	(6) 142.899.800	(7) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	(8) Kab. Gunungkidul	(9) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	(10) 6 Dokumen	(11) 67.619.800	(12)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Usulan dari masyarakat tersebut akan dipertimbangkan melalui Musrenbang Kapanewon Usulan program/kegiatan dari masyarakat lewat kamus usulan yang dibuat untuk tahun 2026, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemampuannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut akan dimasukkan dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapannya tersaji dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kalurahan Kemadang, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
2	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jl. Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
3	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Krambilsawit, Saptosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
5	(PIWK) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Balai kalurahan beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
6	PIS-Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
7	PIS-Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Selang, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
8	PIS-Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Kalurahan Tancep,Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
9	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi masyarakat	Kalurahan tancep Kapanewon Ngawen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghuyat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
10	PIS-Pembinaan Organisasi Masyarakat	Kalurahan Tancep	Jumlah Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
11	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	PIS-Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kalurahan watugisar, kapanewon ngawen, kabupaten gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
13	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan watugisar, kapanewon ngawen, kabupaten gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	
14	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi Masyarakat	Umat Kedungkeris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
15	PIS-Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kalurahan Kedungpoh, Ngipar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
16	PIS-Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Sodo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
17	PIS-Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Kalurahan Banyusoco	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
18	PIS-Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Pringapus, RT 001 RW 004, Pucanganom, Rongkop	Jumlah Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan Kemiri, Kaparewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenyagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	
20	PIS-Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
21	PIS-Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Dungubag 2 Duwet Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
22	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi masyarakat	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
23	Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yaitu : *"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing"*. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2026 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : *"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"*

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2026 : *"Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan"*.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Penguatan Pondasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk Semua :
 - a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
 - b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Penguatan Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi sebagai Upaya Menurunkan Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Meningkatkan Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan;
 - a. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
3. Meletakkan Dasar Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, dan Budaya Berkelanjutan
 - a. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.
4. Memperkuat Pondasi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penguatan reformasi kalurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
 - a. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Penguatan Pondasi Ketangguhan Diplomasi dan Daya Gantar Kawasan dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

- a. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dikaitkan dengan kondisi dinamika Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dijabarkan sebagaimana di bawah ini :

a. Tujuan PD Tahun 2021-2026

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	6,70
		persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	70,01
		Persentase konflik sosial yang tertangani	94

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	70.01%
2.	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	94%

3.	Meningkatnya Harmoni dan Kerukunan	Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialisasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan	6.70
----	------------------------------------	---	------

Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 359/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU tahun 2026
1	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	100%
2	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	94%
3.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia	6,70

Selanjutnya berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan indikator kinerja program dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 13/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah calon peserta paskibraka Se Kabupaten Gunungkidul}}{\sum \text{Jumlah siswa kelas X Se Kabupaten Gunungkidul}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
2.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif

3.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat	$\frac{\sum \text{Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70}}{\sum \text{jumlah peserta yang mengikuti pembinaan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
3.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif	$\frac{\sum \text{Ormas yang melapor}}{\sum \text{Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Komulatif
4.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	$\frac{\sum \text{Jumlah kebijakan yang terealisasi}}{\sum \text{Jumlah rumusan kebijakan}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
5.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100 \%$ Tipologi data:Non Kumulatif
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data:Non Kumulatif

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah sesuai pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan. Pada tahun 2024 belanja gaji ASN dan hibah/bansos dimasukkan dalam Renja Perangkat Daerah beserta pagu anggarannya sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2026

No.	Uraian	Pagu PD (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.174.688.130,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	176.696.240,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	89.252.809,80
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.480.965,60
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.763.750,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.808.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.260.500,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.417.750,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.961.350,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.267.948,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.733.757,75
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.063.182,04
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.306,95
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.095,10
Total		1.710.417.785,24

Tabel 4.2
HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU	NILAI BANTUAN PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	PEMBULATAN BESARNYA BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97.383	3.500	340.840.500	340.840.500
2	Partai Nasdem	87.448	3.500	306.068.000	306.068.000
3	Partai Amanat Nasional	45.579	3.500	159.526.500	159.526.500
4	Partai Golongan Karya	62.330	3.500	218.155.000	218.155.000
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.309	3.500	193.581.500	193.581.500
6	Partai Kebangkitan Bangsa	68.563	3.500	239.970.500	239.970.500
7	Partai Keadilan Sejahtera	39.913	3.500	139.695.500	139.695.500
8	Partai Demokrat	13.265	3.500	46.427.500	46.427.500
Total				1.644.265.000	1.644.265.000

Hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		VI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		a	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
		1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	VII	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		a	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		d	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.3 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 6 (enam) program dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Ketentraman dan Ketertiban	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.256.417.000	
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.256.417.000	
		1 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.115.000.000	
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	141.471.000	
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.238.507.400	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.238.507.400	
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	274.913.100	
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.963.550.000	
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	270.425.700	
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	373.135.300	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	373.135.300	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	373.135.300	

		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
	V	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	
	a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	
	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.245.100	
	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.510.000	
	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.050.000	
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.589.900	
	5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	201.614.800	
	VI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	450.000.000	
	a.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	450.000.000	
	1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	450.000.000	
	VII	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.510.343.785,24	
	a	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	115.540.300	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.150.000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.939.900	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.879.800	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.919.800	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.759.900	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.785.000	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	890.900	
	8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	7.206.000	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.750.856.685,24	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.417.785,24	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.464.900	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.974.000	
	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.454.100	
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.454.100	
	d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.176.900	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.119.000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.744.000	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.799.900	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.210.000	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.104.000	
	e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.845.000	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.845.000	
	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.540.800	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.005.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.935.800	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.600.000	
	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.930.000	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.350.000	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.580.000	
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan prioritas, sasaran dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 akan kami paparkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentrangan dan Ketertiban	Ketentrangan, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	92%	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keislamican Yogyakarta Urusan Kebudayaan	450.000.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07	Alat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	450.000.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	450.000.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.256.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.256.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	141.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnaspaskibraka	1.115.000.000	BAKESBANGPOL
					8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.771.491.840	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	100%	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.771.491.840	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	274.913.100	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.963.550.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketertarikan dan ketertarikan	Ketertarikan, ketertarikan, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	93%	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	373.135.300	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	373.135.300	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	373.135.300	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	93%	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.245.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.510.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.050.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Merungkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.589.900	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	201.614.800	BAKESBANGPOL

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut

Tabel 4.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa da Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode		Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyelenggaraan Paga Indikator (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2	22	08				450.000.000			400.000.000
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	100%	450.000.000		76%	400.000.000
2	22	08	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Ketahanan Sosial Budaya Terbangun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	450.000.000		400.000.000
2	22	08	0018	Pembangunan ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Dana Keistimewaan DIY	400.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.677.877.325,24			6.609.788.889,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.677.877.325,24			6.609.788.889,00
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	80,30%	2.510.299.485,24		80,35%	2.820.007.000,00
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersusun	100%	115.540.300,00		83.208.000,00
8	01	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.868.000,00

Kode				Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyelenggaraan Paga Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kelurahan Dana/Paga Indikator (Rp)
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	32.939.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	19.230.000,00
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.879.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000,00
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.919.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	960.000,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.759.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	480.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	32.785.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	2.430.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	899.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	900.000,00
8	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita acara	7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita acara	9.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Layanan	1.750.856.685,24			4 Layanan	2.326.722.000,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294 Orang/bulan	1.710.417.785,24	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		294 Orang/bulan	2.319.022.000,00

Kode				Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Kinerja	Perencanaan Paga Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatorif (Rp)
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedingsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.464.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.000.000,00
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	37.974.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	5.700.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Kepegawaian yang tersusun		1 Layanan	32.454.100,00		1 Layanan	2.000.000,00
8	01	01	2.05	0003	Pradatan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pradatan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	32.454.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	2.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Umum tersedia		8 Layanan	351.176.900,00		8 Layanan	196.380.000,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	9.319.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	3.000.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	73.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Paket	48.500.000,00
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	6.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Mula Berencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyelenggaraan Paga Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp)
8	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	14.500.000,00
8	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Dokumen	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		360 Dokumen	1.250.000,00
	01	01	2.06	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	23.210.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	24.230.000,00
8	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	233.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	98.900.000,00
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Persediaan dan Mesin Lainnya		6 Unit	37.845.000,00			2 Unit	20.000.000,00
8	01	01	2.07	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	37.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	20.000.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		6 Laporan	107.540.800,00			6 Laporan	78.372.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	38.005.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.000.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	63.935.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	54.917.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	16.455.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Page Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	4 layanan	114.885.600,00			4 layanan	113.325.000,00
8	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	154 Unit	68.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Unit	66.250.000,00
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	14.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	10.700.000,00
8	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	26.535.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.375.000,00
8	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	20 Unit	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	6.000.000,00
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,7 INDEKS	1.256.471.000,00			6,8 INDEKS	1.207.599.234,00
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan wawasan kebangsaan	100%	1.256.471.000,00			100%	1.207.599.234,00
8	01	02	2.01	Penaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggul Ika dan Sejarah Kebangsaan	370 Orang	141.471.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750 Orang	9.000.000,00
8	01	02	2.01	Pembinaan terhadap aktivitas kepersidhakaan dan Parnapaskabaka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepersidhakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Parnapaskabaka	3 Dokumen	1.115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	1.198.599.234,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Kinerja	Kelurahan / Penyelamatan Paga / Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikator (Rp)
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik		70,01 %	1.771.536.140,00			70,02%	1.291.407.758,00
8	01	03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Partai Politik		100%	1.771.536.140,00			100 %	1.291.407.758,00
8	01	03	0003 Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000 Orang	274.957.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	147.895.000,00
8	01	03	0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	1.490.578.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	1.143.512.758,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Biaya Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyusunan Paga Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatorif (Rp)
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan		67%	370.425.700,00			68%	76.625.000,00
8	01	04		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		7 Kali	370.425.700,00			7 Kali	76.625.000,00
8	01	04	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1700 Orang	270.425.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	76.625.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		100%	373.135.300,00			100%	80.100.000,00
8	01	05		Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		9 Kali	373.135.300,00			9 Kali	80.100.000,00
8	01	05	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	373.135.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Orang	80.100.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Pencapaian Mula Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Kinerja	Kelompok Penyelamatan Paga Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kelompok Dana/Pagu Indikator (Rp)
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		93%	496.009.700,00			94%	1.134.049.897,00
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	45 Layanan	496.009.700,00				1.134.049.897,00
8	01	06	2.01	0001 Penyelenggaraan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2 Dokumen	2.245.000,00	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	62.100.000,00
8	01	06	2.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	140 Orang	43.510.000,00	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	150 Orang	94.249.897,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maja Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Pemasokan Paga Indikatorif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatorif (Rp)
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1080 Orang	209.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	153.200.000,00
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	39.589.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	124.200.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	201.614.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	700.300.000,00
							TOTAL	7.127.877.325,24				
									7.109.788.889,00			



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD. Pagu alokasi Badan Kesbangpol pada tahun 2026 sebesar Rp7.127.877.325,24. dengan rincian: DAU murni sebesar Rp2.831.717.224,60. Yang belum teranggarkan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka kurang Rp. 186.657.600,00. Tambahan honor Sekretariat Forkopimda kurang 2 bulan sebesar Rp. 7.100.000,00. Pelaksanaan koordinasi Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan oaring asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penengangan konflik di daerah Rp15.300.000,00. Penyedia jasa layanan umum kantor (Tenaga Outsourcing) Rp.120.294.000,00. Honor Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol non ASN Rp2.200.000,00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.000.000,00.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan

program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman rencana dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

JOHAN EKO SUDARTO

